

# MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN : PERLUNYA TALENTA PROFESIONAL DI INDUSTRI JASA KEUANGAN

**Bapak Mirza Adityaswara**  
**Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK**

Senin, 23 Oktober 2023



# APA ITU SISTEM KEUANGAN?

## Sistem Keuangan

adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

\*Definisi sesuai Pasal 1 UU **Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan

## Elemen Sistem Keuangan:



### Lembaga Intermediasi Keuangan

- Bank, dan
- Non Bank



### Instrumen Keuangan

- Saham,
- Obligasi,
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dsb



### Pasar Keuangan

- Pasar Uang, dan
- Pasar Modal



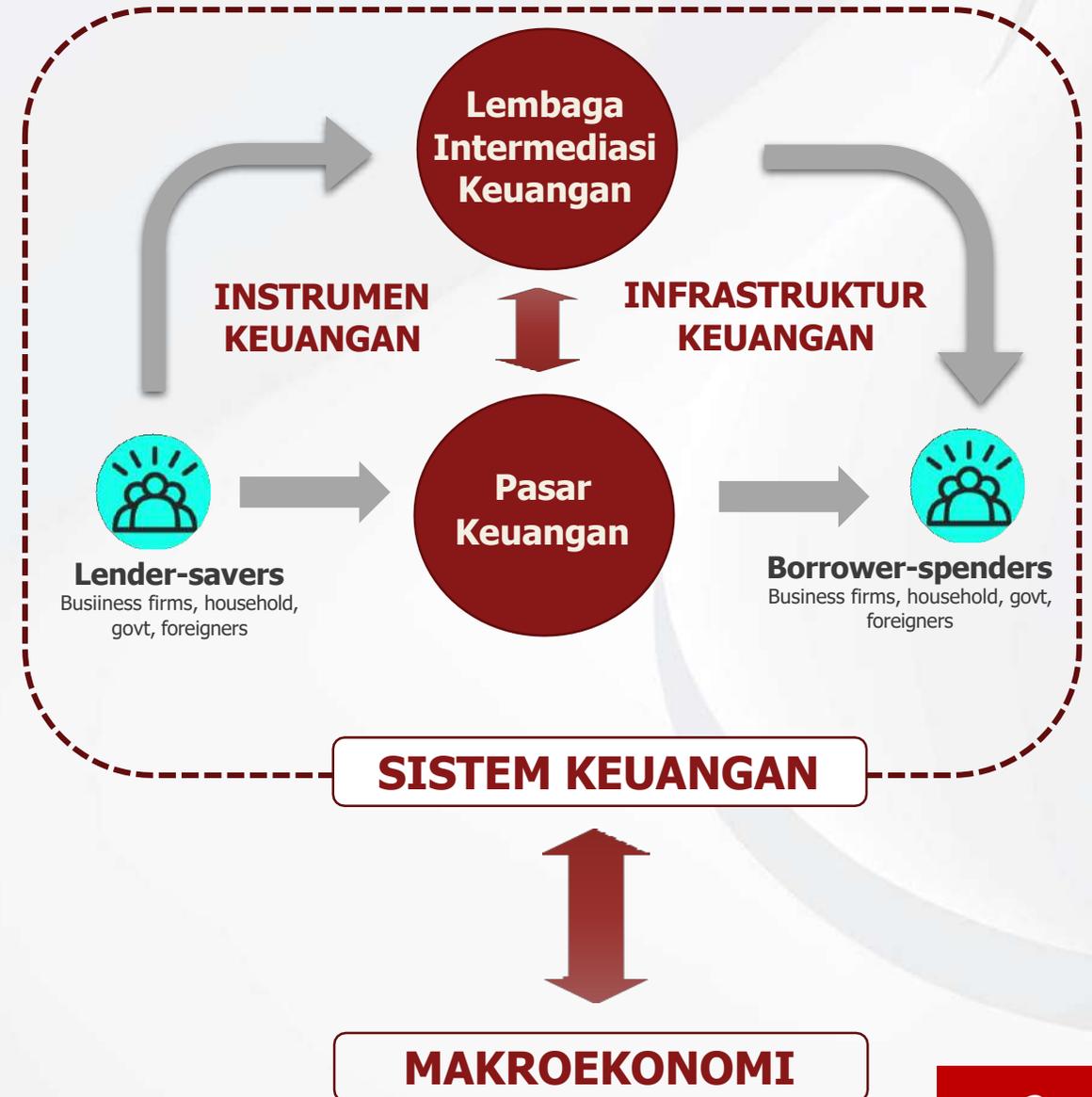
### Infrastruktur Keuangan

- Sistem pembayaran,
- Kliring efek, dsb



### Pengguna Jasa Keuangan

- Korporasi,
- Rumah Tangga,
- Pemerintah, dan
- Luar Negeri



**Stabilitas Sistem Keuangan** adalah kemampuan **mengalokasikan sumber daya secara efisien, menilai dan mengelola risiko keuangan, mempertahankan tingkat pekerjaan mendekati tingkat alami ekonomi, dan menghilangkan pergerakan harga relatif aset riil atau keuangan** yang akan mempengaruhi stabilitas moneter atau tingkat pekerja

The World Bank – Global Financial Development Report (2016).



Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan penting ?

## Mendukung Pembangunan Ekonomi

Intermediasi keuangan yang efektif dan efisien akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan

## Biaya Penanganan Krisis

Penanganan krisis umumnya menelan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lama

## Kepercayaan Publik

Ketidakstabilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan akan diikuti oleh kepanikan investor (*bank run*) yang dapat menggoyahkan perekonomian.

## Memudahkan Perencanaan

Instabilitas hanya memungkinkan perencanaan dalam jangka pendek

# Arsitektur Otoritas Pengawasan dan Pengaturan Sektor Keuangan

Pengalaman krisis keuangan telah *men-trigger* berbagai yurisdiksi untuk melakukan perubahan pada arsitektur pengawasan sektor keuangannya agar sistem pencegahan dan manajemen krisis dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Beberapa model arsitektur yang digunakan diantaranya sektoral, *integrated*, dan *partially integrated*.

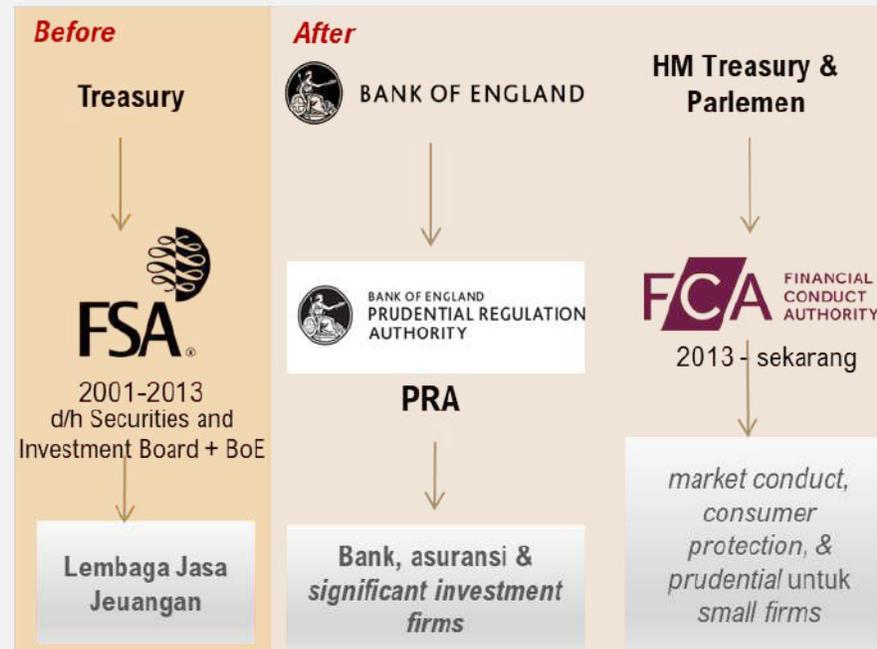
## Jepang

Krisis di Jepang dan penutupan beberapa Bank pada 1995-1997 mengakibatkan otoritas pengawas Lembaga keuangan beralih dari Kemenkeu (MoF) ke Japan Financial Supervisory Authority (JFSA) sebagai Lembaga independent. JFSA dianggap sukses dengan koordinasi erat antara Bank of Japan (BoJ) dengan JFSA



## Inggris

Pada masa krisis global 2008, otoritas pengawas sektor keuangan Inggris FSA dianggap gagal pasca kegagalan dalam menangani Northern Rock Bank akibat kurangnya koordinasi antara Financial Services Authority (FSA) Inggris dengan Bank of England (BoE). Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh FCA dan PRA



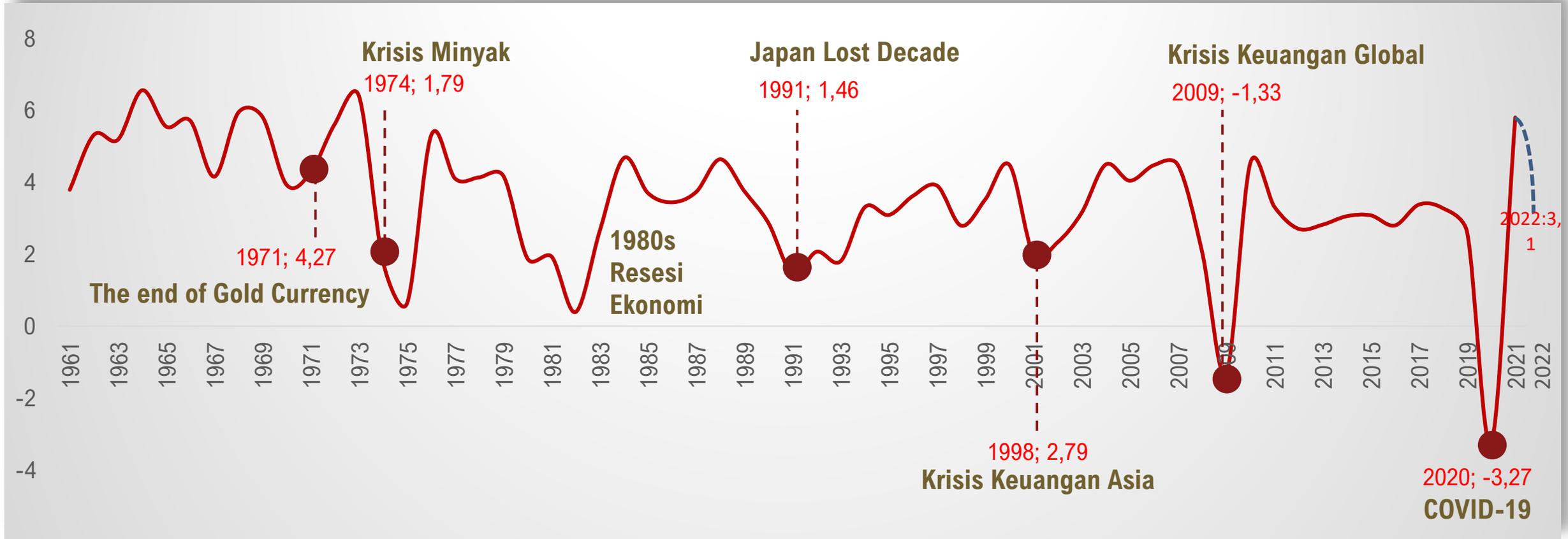
## Indonesia

Di Indonesia, pengawasan perbankan sebelumnya di BI dan pengawasan PM dan IKNB di Kemenkeu kemudian digabung menjadi di bawah pengawasan OJK



# Pelajaran Berharga dari Krisis Global

## Pertumbuhan Ekonomi Global 1961 – 2022 (% yoy)

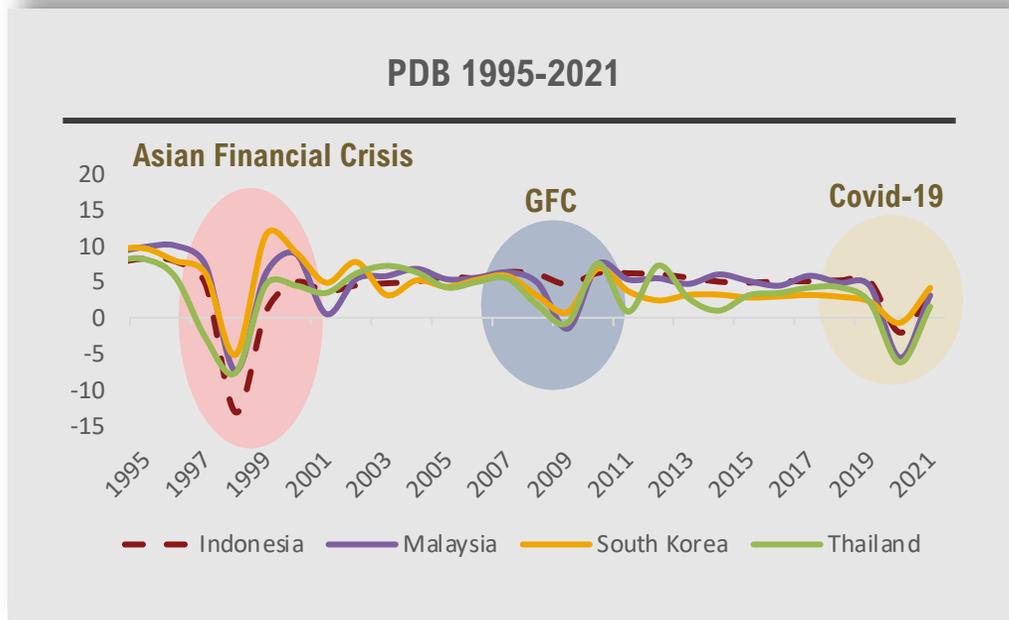
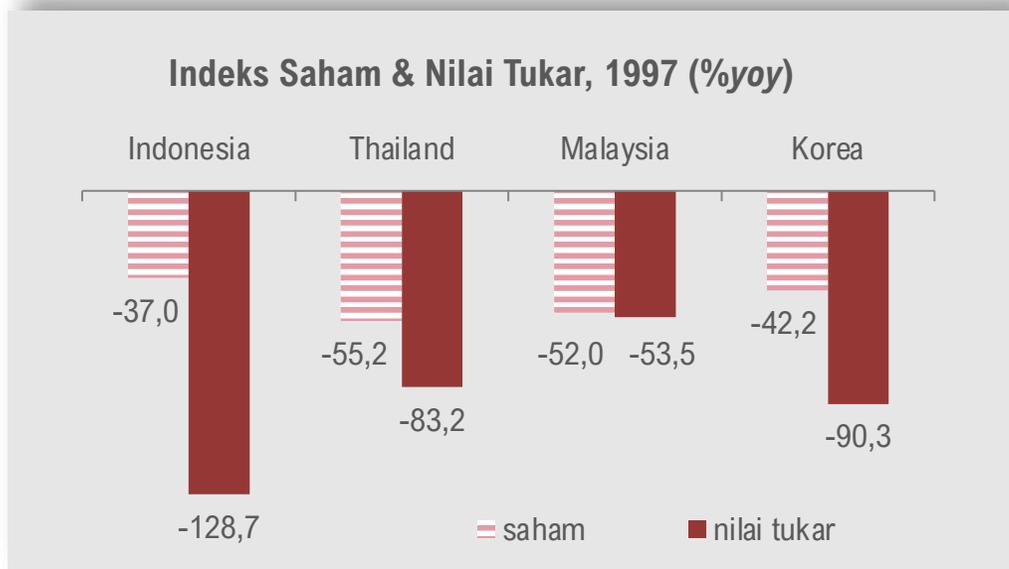


Sumber: World Bank



Pelajaran penting dari krisis keuangan global sebelumnya, potensi risiko ke depan membuat penanganan krisis lebih penting

# Pelajaran Berharga dari Krisis Keuangan Asia



Periode krisis dimulai dengan melemahnya nilai tukar di beberapa negara berkembang Asia



Tidak ada *capping* mata uang lokal; beberapa negara menerima paket bailout dari IMF

## Dampak Krisis Keuangan di Asia

Pertumbuhan PDB Indonesia terkontraksi -13,1% pada 1998



Biaya penanganan sektor perbankan : **50% dari PDB**



Dampak politik, jatuhnya rezim yang berkuasa dan telah mendominasi politik Indonesia selama lebih dari 30 tahun



UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPKSK) memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga/otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tugas dan kewenangannya.



Notes: \*Risiko Idiosinkratik adalah risiko yang hanya memengaruhi satu pelaku ekonomi tunggal. Jenis risiko ini tidak sistematis atau tidak berkorelasi dengan risiko pasar secara keseluruhan

# Respon Kebijakan OJK untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Kebijakan di sektor keuangan berikut perlu diiringi dengan penanganan pengendalian pandemi Covid-19 dan stabilitas makroekonomi



## Memberi Kemudahan bagi SJK

- Pengawasan dan penyampaian laporan menggunakan sistem informasi
- E-RUPS: RUPS dapat dilakukan dengan media elektronik
- *Fit and proper test* dapat menggunakan video conf
- Pemasaran PAYDI dengan sarana digital
- Penggunaan *digital signature* untuk perizinan WMI dan WAPERD
- Relaksasi Penagihan Sanksi Denda dan pembayaran Bunga

## Meredam Volatilitas Pasar Keuangan

- Pelarangan transaksi *short selling*
- *Buyback* saham tanpa melalui RUPS
- Perubahan Batasan *Auto Rejection (Asymmetric)*
- Peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (pre-opening) di Bursa
- *Trading halt* untuk penurunan 5%
- Pemendekan jam perdagangan Efek
- Penyesuaian waktu Pelaporan Di PLTE, Jam Perdagangan EBUS di Bursa dan Jam Perdagangan EBUS di PPA

## Memberi Ruang Gerak Sektor Riil

- Program Restrukturisasi Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, & LKM
- Relaksasi Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp 10 miliar.
- Relaksasi kewajiban pelaporan bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah
- Himbauan tidak menggunakan *debt collector*
- Pengembangan Ekosistem Digital UMKM

## Menjaga Stabilitas & Optimalisasi Peran SJK

- Pemanfaatan restrukturisasi Covid-19 agar tidak terjadi pemburukan kualitas kredit
- Penundaan penerapan standar Basel III
- Peniadaan kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer*
- Penurunan batas minimum rasio LCR dan NSFR 85%
- Penundaan penilaian kualitas AYDA
- Relaksasasi Penempatan Dana antar bank
- Penurunan PPAP umum khusus BPR
- Perintah tertulis untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi Bank Umum dan IKNB
- Mengecualikan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal
- Relaksasi nilai haircut untuk perhitungan *collateral* dan MKBD
- Stimulus lanjutan: relaksasi ATMR di sektor kesehatan, property, dan KKB

Untuk mengatasi *scarring effect* akibat pandemi Covid-19, OJK memberikan stimulus tambahan restrukturisasi kredit selama 1 (satu) tahun s.d. 31 Maret 2024 secara *targeted* untuk sektor UMKM, penyedia mamin, dan industri yang padat karya yaitu TPT dan alas kaki

# STABILITAS SJK TERUS TERJAGA, DENGAN PERMODALAN TINGGI DAN LIKUIDITAS MEMADAI

## PERBANKAN

### INTERMEDIASI

	Agu-22	Dec-22	Jul-23	Agu-23
Kredit (Rp T)	6.179	6.424	6.686	6.739
% Yoy	10,62	11,35	8,54	9,06
% Ytd	7,12	11,35	4,08	4,92
% Mtm	0,33	1,20	0,44	0,81
DPK (Rp T)	7.608	8.154	8.064	8.082
% Yoy	7,77	9,01	6,62	6,24
% Ytd	1,72	9,01	-1,09	-0,87
% Mtm	0,59	2,25	0,28	0,23
LDR	81,22	78,78	82,90	83,38

### PERMODALAN

	Agu-22	Dec-22	Jul-23	Agu-23
CAR (%)	25,07	25,63	27,44	27,66

### KREDIT RESTRU COVID

	Agu-22	Dec-22	Jul-23	Agu-23
Kredit Restru Covid	543,42	469,15	339,13	326,15

### PROFITABILITAS

	Agu-22	Dec-22	Jul-23	Agu-23
NIM (%)	4,73	4,71	4,84	4,87
ROA (%)	2,48	2,43	2,75	2,74

### PROFIL RISIKO

	Agu-22	Dec-22	Jul-23	Agu-23
<b>Risiko Kredit</b>				
NPL Gross (%)	2,88	2,44	2,51	2,50
NPL Net (%)	0,79	0,71	0,80	0,79
LaR	16,46	14,05	12,59	12,55
<b>Risiko Pasar</b>				
PDN (%)	1,6	1,23	1,75	1,72
<b>Risiko Likuiditas</b>				
Alat likuid (Rp T)	2.018	2.544	2.143	2.141
AL/NCD (%)	118,01	137,67	118,37	118,50
AL/DPK (%)	26,52	31,20	26,57	26,49
LCR	238,71	242,58	227,10	232,20
NSFR*		140,42		

\*data kuartal

# STABILITAS SJK TERUS TERJAGA, DENGAN PERMODALAN TINGGI DAN LIKUIDITAS MEMADAI (2)

## PASAR MODAL

	IHSG		ICBI		NAB (Rp T)*	
(29 Sep 2023) Ytd	6939,89	↑ 1,30%	365,17	↑ 5,91%	507,98	↑ 0,62%
(31 Aug 2023) Ytd	6953,26	↑ 1,50%	369,52	↑ 7,17%	513,24	↑ 1,66%

### ARUS DANA MASUK KELUAR

YTD	2021	2022	Jun'23	Jul'23	Aug'23	Sep'23
Saham (Rp T)	37,97	60,58	16,21	18,92	-1,18	-5,24
SBN (Rp T)	-82,57	-129,16	84,70	93,00	84,11	60,81
EBUS Korporasi (Rp T)	-4,25	0,20	-0,61	-0,35	-0,56	-0,91
% Kepemilikan Lokal	54,15	54,41	51,32	51,99	53,73	54,80
Jml Investor (juta)	7,49	10,31	11,23	11,42	11,58	11,73
Rerata Nilai Transaksi ytd (Rp T)	13,37	14,71	10,35	10,24	10,38	10,49

### PENGHIMPUNAN DANA

JENIS	s.d. 29 Sep 2023		PIPELINE		SCF***
	JML	NILAI**	JML	NILAI**	29-Sep-23
IPO	65	51,91	58	10,50	Penyelenggara 16
PUT	19	37,00	11	9,30	Penerbit 456
EBUS	9	7,97	11	15,01	Pemodal 161.660
PUB EBUS Th I, II, dst.	76	93,14	9	6,40	Nilai (Rp T) 0,98
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>190,02</b>	<b>89</b>	<b>41,21</b>	

### CARBON MARKET SUMMARY 26-30 SEP 2023

Nilai Perdagangan (Rp M)	29,21	Penjual	1	Harga Pembukaan (Rp) <sup>1</sup>	69.600
Volume Perdagangan (Ton CO2e)	459.953	Pembeli	15	Harga Penutupan (Rp) <sup>2</sup>	77.000

\* Per Unit Karbon Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)

### NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION) REKSA DANA

YTD	2021	2022	Jun'23	Jul'23	Aug'23	Sep'23
Reksa Dana (Rp T)*	-4,85	-78,33	-2,41	1,79	8,58	9,54

### NAB REKSA DANA (Rp T)\*

Jenis	2021	2022	Jul'23	Aug'23	Sep'23	Ytd (%)
Reksa Dana <sup>1</sup>	563,67	491,10	501,27	496,98	491,01	-0,02
KPD <sup>2</sup>	215,79	268,87	274,42	277,66	277,59	3,24
RDPT <sup>3</sup>	30,70	27,25	25,96	25,96	25,96	-4,71
EBA	3,15	1,71	1,66	2,60	1,63	-4,92
EBA-SP	3,55	3,20	2,87	2,87	2,87	-10,23
ETF <sup>4</sup>	14,77	13,76	15,39	16,26	16,97	23,36
DIRE	10,24	10,33	10,31	10,32	10,33	-0,01
DINFRA	7,53	7,99	8,37	8,37	8,37	4,81
KIK PD TAPERA	1,53	3,33	3,44	3,45	3,44	3,47
<b>Total</b>	<b>850,92</b>	<b>827,54</b>	<b>843,70</b>	<b>844,47</b>	<b>838,18</b>	<b>1,29</b>

\* data per 27 Sep 2023

\*\* dalam Rp Triliun

\*\*\* fully funded

<sup>1</sup> tidak termasuk Reksa Dana ETF

<sup>2</sup> data per Agustus 2023 (lag 1 bulan)

<sup>3</sup> data per Juni 2023 (lag 3 bulan)

<sup>4</sup> termasuk ETF syariah

# STABILITAS SJK TERUS TERJAGA, DENGAN PERMODALAN TINGGI DAN LIKUIDITAS MEMADAI (3)

## IKNB - Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP)

ASURANSI											
	Dec-21	Aug-22	Dec-22	Jul-23	Aug-23		Dec-21	Aug-22	Dec-22	Jul-23	Aug-23
<b>Pendapatan Premi<sup>1</sup></b>						<b>ASURANSI SOSIAL</b>					
Nominal (Rp T)	308,11	205,90	311,48	177,13	203,42	Aset BPJS Kesehatan (Rp T)	83,36	103,81	112,89	118,95	118,25
Growth (%yoy)	5,05	2,10	1,09	-2,34	-1,20	Aset BPJS Ketenagakerjaan (Rp T)	568,08	613,37	645,06	699,79	704,67
<b>Premi Asuransi Jiwa</b>						<b>DANA PENSIUN<sup>2</sup></b>					
Nominal (Rp T)	204,98	126,63	192,80	102,12	118,30	Jumlah investasi (Rp T)	319,02	324,59	335,65	347,95	349,16
Growth (%yoy)	9,74	-5,74	-5,94	-7,85	-6,58	Nilai Aset (Rp T)	329,55	336,14	344,89	360,08	361,01
<b>Premi Asuransi Umum dan Reasuransi</b>						<b>PERUSAHAAN PENJAMINAN</b>					
Nominal (Rp T)	103,14	79,27	118,68	75,02	85,13	Jumlah investasi (Rp T)	20,60	20,90	22,59	25,75	25,35
Growth (%yoy)	-3,17	17,77	15,07	6,30	7,38	Pendapatan IJP <sup>3</sup> Neto (Rp T)	0,49	4,31	6,99	4,52	5,16
<b>RBC<sup>2</sup></b>						Nilai Aset (Rp T)					
As. umum dan Reas (%)	325,52	307,51	324,52	311,53	310,63		37,48	39,42	39,12	44,64	44,66
Asuransi Jiwa (%)	535,03	481,51	480,43	460,32	452,31						

<sup>1</sup>as. Komersial mencakup konvensional dan syariah | Posisi Desember merupakan akumulasi premi dalam 1 tahun | <sup>2</sup>mencakup konvensional dan syariah | <sup>3</sup>IJP merupakan nilai Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

# STABILITAS SJK TERUS TERJAGA, DENGAN PERMODALAN TINGGI DAN LIKUIDITAS MEMADAI (4)

## IKNB - Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

### PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

	Dec-21	Aug-22	Dec-22	Jul-23	Aug-23
<b>Piutang Pembiayaan</b>					
Nominal (Rp T)	364,23	389,54	415,86	447,03	453,16
Growth (%yoy)	-1,49	8,57	14,18	16,22	16,33
NPF Gross PP (%)	3,53	2,60	2,32	2,69	2,66
NPF Net PP (%)	1,16	0,70	0,58	0,73	0,76
Gearing Ratio (x)	1,98	1,96	2,07	2,24	2,22

### MODAL VENTURA

	Dec-21	Aug-22	Dec-22	Jul-23	Aug-23
Pembiayaan Modal Ventura (Rp T)	16,08	17,96	18,02	18,12	17,79
Nilai Aset (Rp T)	21,27	24,05	25,94	27,64	27,61

### LKM

	Dec-21	Apr-22	Aug-22	Dec-22	Apr-23
Penyaluran Pinjaman (Rp T)	0,84	0,91	0,91	0,95	0,98
Nilai Aset (Rp T)	1,38	1,38	1,44	1,52	1,47

### FINTECH P2P LENDING

	Dec-21	Aug-22	Dec-22	Jul-23	Aug-23
Outstanding Pembiayaan (Rp T)	29,88	47,23	51,12	55,98	53,12
Growth (%yoy)	95,05	80,97	71,09	22,41	12,46
TWP 90 (%)	2,29	2,89	2,78	3,47	2,88

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.



## LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG DIAWASI OJK



### PERBANKAN

- Bank Umum: **105**
- BPR: **1.584**



### PASAR MODAL

- Perusahaan Efek & Manajer Investasi: **40.168**
- Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal: **2.237**



### INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

- Perusahaan Asuransi: **149**
- Dana Pensiun: **199**
- Lembaga Pembiayaan: **209**
- LKK\*: **158**
- Jasa Penunjang IKNB: **223**
- LKM\*\*: **239**
- Fintech Berizin : **102**

Notes:

\*LKK (Lembaga Keuangan Khusus, seperti LPEI, Pegadaian, SMF, Lembaga Penjamin, PNM)

\*\* LKM (Lembaga Keuangan Mikro )

## 1. SEKTOR STRATEGIS



“ Stabilitas sektor jasa keuangan merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pengembangan SDM sektor jasa keuangan menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. ”

## 2. KESENJANGAN KOMPETENSI

Indonesia perlu berbenah dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga memiliki keunggulan kompetitif dari negara tetangga. ”

## 3. KONDISI GLOBAL

Indonesia harus memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan keterampilan dan riset khususnya di sektor jasa keuangan agar memiliki daya saing regional dan global. ”

Country	World Talent Ranking (2022)	World Competitiveness Ranking (2023)	Human Development Ranking (2021)
 Singapura	12	4	12
 Malaysia	33	27	62
 Thailand	45	30	66
 Indonesia	51	34	114
 Philippines	54	52	116

1) Sumber: IMD World Talent Ranking  
 2) Sumber : World Competitiveness Center  
 3) Sumber: The Annual Human Development Report

## Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Jasa Keuangan



### Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

Sebagai acuan bagi seluruh pelaku industri sektor jasa keuangan dalam mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM agar pengembangan SDM di masing-masing sektor jasa keuangan dapat lebih terarah dan memiliki standar yang terukur bagi seluruh pemangku kepentingan.

# CETAK BIRU PENGEMBANGAN SDM SJK 2021 - 2025

“ OJK telah memiliki Cetak Biru sebagai pedoman dalam pengembangan SDM SJK ”

## HARAPAN DENGAN ADANYA CETAK BIRU PENGEMBANGAN SDM SJK:

1 Sebagai pedoman atau arahan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM SJK



2 Mengharmonisasikan tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM SJK



3 Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM SJK baik secara nasional maupun internasional



# TERIMA KASIH



**ojkindonesia**



**official.ojk**



**Otoritas Jasa  
Keuangan**



**www.ojk.go.id**